

Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang

COORDINATION OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM OBJECTS OF TANJUNG DURIAT, SUMEDANG REGENCY

¹Suhermanudin, ²Ahmad Zakiyuddin

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Langlangbuana

¹mandin576@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pengembangan objek wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti menemukan berbagai masalah koordinasi yang terjadi diantaranya yaitu seperti kualitas keterampilan dan pengetahuan unit-unit atau organisasi-organisasi yang minim, jarang nya gerak kegiatan yang dilakukan, minimnya komunikasi yang terjalin antara DISPARBUDPORA Perum Perhutani LMDH, dan Investor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koordinasi yang efektif menurut Dann Sugandha (1991:13) yang meliputi unit-unit atau organisasi-organisasi, sumber-sumber (potensi), kesatupaduan, gerak kegiatan, keserasian, arah yang sama (sasaran). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang tidak optimal karena bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dengan Perum Perhutani adalah koordinasi horizontal interrelated yaitu koordinasi antar badan/instansi beserta unit – unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf, belum terjalinnya komunikasi yang baik antara Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dengan instansi-instansi yang bekerjasama dalam Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat.

Kata kunci: Pengembangan objek wisata, koordinasi, instansi

ABSTRACT

The title "Coordination of the Development of Tanjung Duriat Tourism District Sumedang." This research is motivated by the lack of optimal coordination for the development of Tanjung Durat Tourism District Sumedang. Based on the research background, the researcher found various coordination problems that occurred, such as the quality of skills and knowledge of units or organizations that were minimal, the lack of movement of activities carried out, the lack of communication that was established. The theory used in this research is effective coordination according to Dann Sugandha (1991: 13) which includes units or organizations, resources (potential), unity, activity movement, harmony, the same direction (target). The research method used is descriptive research method, with

a qualitative approach. Data obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the coordination carried out by the Tourism, Culture, Youth and Sports Office of District Sumedang in the Coordination of Development of Tanjung Durat Tourism District Sumedang is not optimal because the form of coordination carried out by the Youth and Sports Culture Tourism Office with Perum Perhutani is horizontal coordination. interrelated, namely coordination between agencies / agencies and units with different functions, but agencies that are interdependent or have an internal or external connection at the same level, there has not been good communication between the Tourism, Culture, Youth and Sports Office of Sumedang Regency with agencies that cooperate in the Coordination of the Development of Tanjung Durat Tourism Objects.

Keywords: *tourism object development, coordination, agency*

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata saat ini semakin berperan dalam menunjang pembangunan nasional maupun daerah. Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang – undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata. Salah satu amanah undang – undang tersebut adalah pemerintah harus segera menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) bagi daerah sebagai acuan pokok pembangunan kepariwisataan. Sejalan dengan amanah tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010 – 2025.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan Nasional menjadi kegiatan ekonomi yang diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan

berusaha dari lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam, nilai dan budaya bangsa. Untuk mencapai target tersebut, maka kegiatan pariwisata perlu ditingkatkan karena selain menambah devisa negara, juga memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan aneka ragam kebudayaan serta alam Indonesia yang indah.

Perkembangan pariwisata di Indonesia sekarang ini semakin pesat perkembangan sektor pariwisata menjanjikan dan memberikan manfaat kepada banyak pihak dari pemerintah, masyarakat maupun swasta. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang di gunakan sebagai sumber yang menjanjikan bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar objek wisata. Oleh karena itu membuat banyak daerah berkeinginan untuk mengadakan pembangunan di bidang pariwisata. Kabupaten Sumedang adalah salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat menjadi salah satu Kabupaten yang belakangan ini mulai melirik sektor

pariwisata. Sangat banyak potensi wisata yang bisa digali, mulai dari wisata kebudayaan sampai wisata alam yang sangat mempesona. Kabupaten Sumedang mempunyai potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai objek wisata, baik objek wisata alam maupun objek wisata buatan.

Kabupaten Sumedang yang masih terkenal kental dengan adat kebudayaannya juga memiliki potensi - potensi alamnya yang indah tetapi belum dikembangkan dengan optimal. Melihat hal tersebut maka bukan tidak mungkin lagi pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membuat potensi pariwisatanya dikembangkan dengan mengelolanya menjadi lebih baik sehingga diminati wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan asing. Selain itu jika dikembangkan dengan sangat baik maka akan menyumbang banyak bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2011 tentang kepariwisataan. Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan untuk mengembangkan objek wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang. Dinas pariwisata Kabupaten Sumedang berkoordinasi dengan beberapa instansi antara lain seperti Perum Perhutani Sumedang dan juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pajagan. Harapannya, adanya kerjasama pengelola Wisata Tanjung Duriat antara Perum Perhutani Sumedang dengan LMDH Sumedang menjadi langkah awal yang baik dalam membangun sinergitas antara Perum Perhutani dengan *stakeholder*

untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan agar tetap lestari dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar wana wisata Tanjung Duriat. Melihat hal tersebut, sektor pariwisata di Kabupaten Sumedang perlu mendapatkan perhatian. Karena masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan sektor pariwisata, terutama pengembangannya masih dirasakan parsial dan belum ada keselarasan dari pihak terkait sehingga pengembangan objek wisata itu dimana belum maksimal.

Salah satu contohnya wisata yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah pengembangan objek wisata Tanjung Duriat merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumedang yang kondisinya tidak berkembang, padahal wisata Tanjung Duriat di gadang - gadang akan menjadi salah satu tempat wisata unggulan yang ada di kawasan Waduk Jatigede, akan tetapi dari tahun ke tahun kondisinya tidak berkembang. Untuk itu diperlukan sebuah upaya dari instansi terkait agar memiliki langkah – langkah yang nyata dalam mengembangkan wisata Tanjung Duriat mengingat wisata ini mempunyai potensi besar agar berhasil dan membawa dampak perubahan yang lebih baik di berbagai bidang. Di sinilah pentingnya kerjasama dan kebersamaan yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan sektor pariwisata.

Berdasarkan peninjauan awal penelitian penulis melihat bahwa objek wisata Tanjung Duriat ini tidak berkembang, hal itu terlihat dari :

1. Akses jalan menuju tempat objek wisata yang tidak kunjung diperbaiki.
2. Fasilitas umum yang ada di tempat objek wisata seperti toilet tidak bersih, tempat santai yang tidak nyaman, tempat parkir yang tidak memadai, tidak adanya tempat sampah, dan lingkungan yang tidak terurus.
3. Tidak adanya aturan dan sanksi yang jelas dan tegas.

Dari fenomena di atas penulis menyimpulkan ada beberapa hal yang menjadi indikasi mengapa pengembangan objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang itu tidak berkembang diantaranya :

1. Kualitas keterampilan dan pengetahuan unit-unit atau organisasi-organisasi yang mengelola kurang profesional sehingga tidak memiliki terobosan-terobosan dalam pembaharuan serta teknologi, anggaran serta fasilitas kerja yang masih minim.
2. Jarangnya gerak kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Perum Perhutani dalam melakukan monitoring ke Objek Wisata Tanjung Duriat.
3. Minimnya komunikasi antara Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Perum Perhutani, Pemerintah Desa Pajagan, dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sehingga tidak mewujudkan suatu integritas atau satu kesatuan yang kompak.

Hubungan pengembangan objek wisata Tanjung Duriat terkait dengan

pelaksanaan fungsi koordinasi yaitu pengembangannya melibatkan lebih dari dua instansi terkait. Disparbudpora sebagai instansi pemerintahan memiliki fungsi koordinasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan. koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : bidang keamanan dan ketertiban; bidang prasarana umum yang meliputi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; bidang transformasi; dan bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.

Perum Perhutani sebagai instansi kedua memiliki fungsi sebagai pengusaha kawasan pariwisata hal itu tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata pasal 24 yang berbunyi “Pengusaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum”. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memiliki fungsi sebagai masyarakat yang membantu mengembangkan pariwisata yang dikelola oleh perum perhutani serta menjaga warisan budaya dan situs - situs yang ada.

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti menentukan konsep koordinasi sebagai suatu pendekatan dikarenakan, pentingnya koordinasi adalah sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya

dalam satu jalan yang harmonis, artinya koordinasi merupakan salah satu cara untuk menstabilkan tata cara dan teknik dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga terbentuk keterpaduan yang utuh dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan latar belakang penelitian ditetapkan rumusan masalah sebagai : Bagaimana koordinasi pengembangan objek wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian kali ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Bagaimana koordinasi pengembangan objek wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang.

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Pengertian Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur - unsur manajemen dan pekerjaan - pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Menurut E. F. L. Brech yang dikutip Handyaningrat (2002:54)

“Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing - masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri”.

2.2 Mekanisme Dan Proses Koordinasi

Menurut Sugandha (1991:27-46) , mekanisme koordinasi yaitu antara lain:

1. Adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin - pemimpin organisasi (untuk kerjasama antarinstansi).
2. Adanya komunikasi yang efektif, tujuan kerjasamanya dan peranan dari tiap pihak yang terlibat, harus dapat menciptakan organisasinya sendiri sedemikian rupa sehingga menjadi suatu organisasi yang mampu memimpin organisasi - organisasi lainnya, meminta ketaatan, kesetiaan, dan disiplin kerja tiap pihak yang terlibat.
3. Terciptanya koordinasi di dalam suatu organisasi akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut benar - benar bergerak sebagai suatu sistem, dan pemimpin akan bertindak sebagai fasilitator dan tenaga pendorong. Siagian (2004:74) berpendapat mengenai cara - cara yang dapat dilakukan dalam mengkoordinasi, yaitu dengan melakukan briefing staf untuk memberitahukan kebijaksanaan pimpinan organisasi kepada staf yang dalam waktu sesingkat mungkin harus diketahui dan mendapat perumusan. Setelah itu diadakan

rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh staf serta mengadakan integrasi daripada pokok - pokok hasil pekerjaan staf. Lalu mengumpulkan laporan - laporan mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi. Selanjutnya mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi serta memberikan petunjuk - petunjuk sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan proses koordinasi bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan antara pimpinan dengan bawahannya dalam kegiatan koordinasi.

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut : Setiap dinas dan lembaga teknis yang menjadi bagian dari satuan kerja pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi supaya pencapaian tujuan penataan ruang supaya lebih efektif dan efisien. Koordinasi merupakan penyatupaduan gerak dari seluruh potensi unit – unit atau organisasi – organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar – benar menarah kepada sasaran yang sama, guna memudahkan pencapaiannya yang efisien. (Sugandha, 1991:11). Adapun indikator – indikator yang terdapat dalam teori ini terbagi menjadi enam hal, yaitu :

1. Unit – unit atau Organisasi – organisasi, yaitu kelompok kerja

didalam suatu organisasi yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda (spesialisasi). Organisasi ini dapat berupa instansi pemerintah, organisasi swasta, ataupun badan usaha.

2. Sumber – sumber (Potensi), yaitu mengenai potensi yang ada pada unit – unit suatu organisasi berupa tenaga kerja, keterampilan, dan pengetahuan personil, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.
3. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala suatu tindakan yang dikerjakan oleh suatu kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya.
4. Kesatupaduan, artinya terdapat kaitan atau hubungan di antara sesama unit organisasi sehingga mewujudkan suatu intergritas atau suatu kesatuan yang kompak dalam penyelenggaraan program.
5. Keserasian, berarti adanya urutan – urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi tugas maupun pertentangan dalam koordinasi.
6. Arah yang sama (sasaran), yaitu pengerahan segala potensi unit organisasi pada satu sasaran yang sama sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi organisasi.

3. Metode Penelitian

Dalam hal ini, peneliti memakai pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini

dinilai paling sesuai, melihat pada topik permasalahan yang diangkat. Peneliti bermaksud untuk mengetahui, mempelajari dan memahami situasi serta kondisi yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif sebuah cara atau upaya lebih untuk menentukan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Kemudian hasil yang didapatkan dilapangan tersebut, baik berupa data / dokumen, dan wawancara dideskripsikan dan dituangkan dalam bentuk kata - kata dan bahasa. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2013:4) mengemukakan, yaitu : Metode - metode untuk mengeksplorasi dari memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau dari kemanusiaan”. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya - upaya penting seperti mengajukan pertanyaan - pertanyaan dari prosedur - prosedur mengumpulkan data spesifikasi para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema - tema khusus ke tema - tema umum dan menafsirkan makna data.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti mendapat sumber data tentang Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang dari narasumber yang dipercaya dan dapat digali informasinya secara mendalam. Selain itu dengan memakai pendekatan ini peneliti dapat terus merespon serta dapat terus memberikan interpretasi terhadap gejala yang terjadi berkaitan dengan peneliti ini. Oleh karena itu, digunakanlah pendekatan kualitatif sebagai metode peneliti ini sehingga peneliti mendapatkan deskripsi yang jelas

tentang data serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fakta yang ada, serta bukan rekaan semata. Metode kualitatif juga berusaha menjelaskan Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2015:137) menjelaskan bahwa “pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dokumentasi dan gabungan keempatnya”. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode yaitu : Observasi Wawancara dan Dokumentasi.

4. Hasil Penelitian

Pembahasan merupakan isi dari analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan dan sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang berjudul Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang, peneliti menggunakan teori unsur - unsur koordinasi menurut Dann Sugandha yaitu Unit - unit atau Organisasi - organisasi, Sumber - sumber (potensi), Gerak kegiatan, Kesatupaduan, Keserasian, Arah yang sama (sasaran).

Unit – unit atau Organisasi –

organisasi merupakan kelompok kerja didalam suatu organisasi yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Organisasi ini dapat berupa instansi pemerintah, organisasi swasta, ataupun badan usaha. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa instansi terkait yang sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan program pesona wisata antara lain Perum Perhutani, dan LMDH. Namun, yang disayangkan adalah belum adanya koordinasi atau kerjasama yang baik dilakukan oleh pihak DISPARBUDPORA, Perum Perhutani dan LMDH Desa Pajagan dalam mengembangkan wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, dijelaskan bahwa salah satu tugas pada Seksi Daya Tarik Wisata adalah pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/lembaga lainnya yang terkait. Namun pada kenyataannya hal ini belum terealisasi. Dalam Peraturan Bupati Sumedang No 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, dijelaskan bahwa salah satu tugas dari Seksi Daya Tarik Wisata adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar unit kerja, instansi terkait dan daerah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat tentunya membutuhkan orang – orang yang memiliki keinginan dan daya kreativitas yang cukup tinggi, itulah sebabnya DISPARBUDPORA

menggandeng Perum Perhutani agar berinvestasi membuka wisata di kawasan Waduk Jatigede. Untuk menambah daya kreativitas yang tinggi Perum Perhutani menggandeng pihak LMDH sebagai masyarakat setempat yang lebih tahu detail kawasan tersebut. Untuk memaksimalkan potensi yang ada Perum Perhutani meningkatkan keterampilan LMDH melalui pelatihan. Selain potensi sumber daya manusia, kecukupan anggaran dan penerapan teknologi yang digunakan pun dapat menunjang pengembangan objek wisata Tanjung Duriat. Dari segi anggaran untuk pengembangan objek wisata Tanjung Duriat berasal dari pihak investor, karena pihak DISPARBUDPORA tidak dapat memberikan bantuan secara finansial maupun fisik hal itu dikarenakan kawasan wisata Tanjung Duriat status tanah nya bukan milik negara. Jika dilihat dari segi penerapan teknologi.

Gerak kegiatan merupakan segala daya upaya, segala suatu tindakan yang dikerjakan oleh suatu kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani terkait dengan pengembangan objek wisata Tanjung Duriat salah satunya adalah penyusunan rencana kerja namun dalam hal ini DISPARBUDPORA tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan rencana kerja karena bentuk koordinasi yang dilakukan oleh DISPARBUDPORA terbatas salah satunya yaitu melakukan pembinaan dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Perum Perhutani dan LMDH. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Perum Perhutani yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah menambah jumlah wahana untuk daya tarik ke pengunjung

kemudian membuka resto dan menambah agrowisata durian dan mangga. Namun, yang disayangkan adalah sampai saat ini DISPARBUDPORA tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja, padahal jika dilibatkan kemungkinan besar akan menambah banyak gagasan yang tersampaikan. Tidak terlibat dalam pengembangan objek wisata yang mana itu berpengaruh pada minimnya inovasi yang ada dan Pihak Perum Perhutani beserta LMDH benar-benar harus bekerja ekstra untuk bisa memunculkan inovasi-inovasi yang hebat demi terlaksananya rencana kegiatan yang telah disusun.

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan objek wisata Tanjung Duriat terdapat satu tujuan lain yaitu untuk memberdayakan masyarakat desa hutan agar kekompakan yang terjalin antara Perum Perhutani dan LMDH meningkat. Namun pada kenyataan di lapangan kekompakan itu malah tidak terjalin karena minimnya komunikasi yang dilakukan hal itu terlihat dari jarang nya pihak Perum Perhutani dalam berkomunikasi kepada pihak LMDH. Begitu pula pihak DISPARBUDPORA minim melakukan komunikasi kepada LMDH hanya sebatas pada pengarahan saja dan itupun jarang dilakukan kemudian antara DISPARBUDPORA dengan pihak Perum Perhutani hanya melakukan komunikasi berupa sharing dan penawaran kerja sama tidak ada komunikasi secara langsung tentang tata kelola dan pola-pola pengembangan. Hal ini dirasa kurang efektif dan sangat disayangkan karena pihak LMDH yang terlibat langsung dalam pengembangan seharusnya mendapatkan lebih banyak arahan dan masukan dari Perum Perhutani ataupun DISPARBUDPORA

agar inovasi-inovasi dan pemahaman akan teknologi-teknologi terus mereka dapatkan. Begitu pula antara Perum Perhutani dengan DISPARBUDPORA sangat disayangkan karena komunikasi yang mereka bangun hanya sebatas sharing dan penawaran kerja sama.

Koordinasi antar instansi/dinas dalam pengembangan objek wisata Tanjung Duriat, dapat dilihat dari urutan pekerjaan dan ketepatan waktu pengerjaan. Jika dilihat dari urutan pengerjaan Perum Perhutani dalam menyusun rencana kerja membutuhkan waktu yang cukup lama bisa mencapai lima tahun. Serta melakukan evaluasi terhadap para staff yang dilakukan empat bulan sekali. Ini sangat disayangkan melihat Perum Perhutani tidak bisa mengefektifkan waktu sebaik mungkin berbanding terbalik dengan pihak DISPARBUDPORA yang mengefektifkan waktu dengan melakukan evaluasi para staffnya sebulan sekali. Dalam memahami target dan tujuan yang ingin dicapai pihak Perum Perhutani memiliki target dan tujuan yaitu menjadikan tempat wisata Tanjung Duriat sebagai agrowisata dan tempat event-event besar. Kemudian DISPARBUDPORA terus berupaya untuk melakukan promosi-promosi wisata Kabupaten Sumedang agar lebih dikenal wisatawan lokal maupun asing. Dan LMDH terus berupaya untuk bekerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Perum Perhutani. Dari semua itu semua pihak telah menyadari semua target yang telah ditentukan namun sangat disayangkan pihak Perum Perhutani tidak bisa mendukungnya dengan mengefektifkan waktu. Jika saja Perum Perhutani mampu mengefektifkan

waktu maka rencana kerja dan target - target yang telah ditentukan akan cepat tercapai.

5. Simpulan Dan Saran

5.1 Simpulan

Peneliti menyimpulkan Koordinasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, Perum Perhutani, dan LMDH dalam Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang dapat dikatakan tidak optimal. Karena, bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dengan Perum Perhutani adalah koordinasi horizontal interrelated yaitu koordinasi antar badan/instansi beserta unit – unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf.

Dalam koordinasi pengembangan wisata tanjung duriat terdapat beberapa faktor penghambat yaitu bentuk koordinasi antara DISPARBUDPORA dengan Perum Perhutani koordinasi horizontal interrelated yaitu koordinasi antar badan/instansi beserta unit – unit yang fungsinya berbeda, Dimana hal ini menyebabkan gerak koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait menjadi terbatas. Serta komunikasi antar instansi terkait pun sangat minim dilakukan dan rencana kerja yang dibuat tertuai dalam kajian analisa kerjasama atau K A K yang biasa disusun selama 5 tahun. Upaya Pengembangan yang dilakukan oleh pihak DISPARBUDPORA yaitu mempromosikan daya tarik wisata menjadi program destinasi wisata pengembangan. Kemudian melakukan

sharing penawaran kerja sama dan membuat kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Perum Perhutani yang sudah di tanda tangan oleh Bupati dan pimpinan Perhutani kph Sumedang selain itu pihak perum perhutani menambah jumlah wahana untuk daya tarik ke pengunjung kemudian membuka resto tambah agrowisata durian dan mangga.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, hasil penelitian, dan kesimpulan yang telah di jabarkan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dan Perum Perhutani hendaknya dalam melaksanakan koordinasi dalam mengembangkan objek wisata Tanjung Duriat harus berbentuk koordinasi Interdisciplinary yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan - tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit - unit yang sama.
2. Untuk mengurangi hambatan yang terjadi dalam koordinasi pengembangan penulis menyarankan agar melakukan komunikasi rutin antar instansi agar rencana untuk mengembangkan objek wisata Tanjung Duriat dapat tercapai sesuai harapan.

3. Untuk mengembangkan wisata Tanjung Duriat penulis menyarankan agar semua pihak ikut terlibat dalam penyusunan rencana kerja agar semakin banyak inovasi - inovasi yang di dapatkan serta untuk mempercepat proses pengembangan wisata objek Tanjung Duriat sebaik nya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang terjun langsung ke lapangan bekerjasama dengan Perum Perhutani untuk ikut serta memberdayakan pihak LMDH Desa Pajagan agar kemampuan para LMDH dapat dioptimalkan.

UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisataan.*

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang *Kepariwisataan.*

Peraturan Bupati Sumedang No 20 Tahun 2017 tentang *Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga*

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Daan Suganda, MPA, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi,* Cetakan Kedua, 1991.
- Handyaningrat Soewarno. 1985 *Pengantar Sudi Ilmu Administrasi Dan Manajemen.* Jakarta : Gunung Agung.
- Hasibuan, Melayu S.P 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,* Bandung, PT. Bumi Aksa.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta

DOKUMEN